

**FUNGSI PENGAWASAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL DALAM AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS DI
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Andalas*



JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2018

ABSTRAK

Wulidatil Fini Fajri. Skripsi S1. Fungsi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Skripsi ini terdiri dari 103 halaman dengan referensi 11 buku teori, 4 buku metode, 2 skripsi, 1 tesis, 2 jurnal, 8 Peraturan Perundang-undangan, 4 website internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian ini dilatar belakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan beberapa urusan pemerintahan dari kabupaten ke provinsi. Salah satunya adalah pengalihan urusan energi dan sumber daya mineral. Peralihan kewenangan tersebut mengakibatkan semakin luasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dalam hal pengawasan. Penelitian ini fokus terhadap pengawasan dalam aktivitas pertambangan emas. Karena pertambangan emas merupakan salah satu jenis usaha pertambangan yang banyak menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori pengawasan preventif dan represif menurut Manullang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat dalam aktivitas pertambangan emas adalah pengawasan administrasi. Sementara, pengawasan represif yang dilakukan adalah inspeksi lapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat belum maksimal karena belum tercapainya hasil-hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas.

Kata kunci : Pengawasan, Pertambangan, Pemerintah, dan Lingkungan.



ABSTRACT

Wulidatil Fini Fajri. Minithesis (Bachelor degree). Supervision Functions of the Department of Energy and Mineral Resources on Gold Mining Activity in West Sumatra Province Post Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. This thesis consists of 103 pages with reference to 11 theoretical books, 4 method books, 2 screens, 1 thesis, 2 journals, 8 laws and regulations, 4 internet websites.

This study aims to describe the implementation of the Supervision Function of the Department of Energy and Mineral Resources on Mining Activities in West Sumatra Post Law No. 23 of 2014 on Regional Government. This study is based on the Law No. 23 of 2014 on the Regional Government release that diverts some government affairs from subdistrict to the province. One of them is the transfer of energy affairs and mineral resources. This transfer of authority has resulted in an increasingly wide area of authority of the provincial government in managing the mining business, including in terms of supervision. This study focuses on supervision in gold mining activities. Because of gold mining is one type of mining business that causes a lot of environmental damage, especially in West Sumatra. In this research, the approach was qualitative with descriptive method. Data collection techniques were interviews and documentation. The selection of informants was done by purposive sampling technique. While the technique of data validity were triangulation. This research was conducted based on preventive and repressive monitoring theory according to Manullang. In this study, it found that preventive monitoring conducted by the ESDM Department of West Sumatra province in gold mining activities was administrative supervision. Meanwhile, the repressive supervision carried out was a field inspection. Supervision conducted by the ESDM Department of West Sumatera province has not been maximized, because the implementation of supervision of gold mining activities has not yet achieved.

Keywords: Supervision, Mining, Government, and Environment.